

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bersasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan baik, menurut rekapitulasi tanggapan responden memiliki nilai rata-rata 3,95 yang berada pada interval 3,40-4,19. Hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) Perumusan strategi anggaran berbasis kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung telah selaras dengan visi, misi dan tujuan yang sudah jelas. memiliki nilai rata-rata 4,07 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (b) Perencanaan strategik anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta komunikasi dan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislative dalam rangka pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan, memiliki nilai rata-rata 4,1 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (c) penyusunan program anggaran berbasis kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung telah ada keselarasan aktivitas dengan program yang

didukung sumber daya yang tersedia serta pengkoordinasian program berdasar pada keahlian yang dimiliki, memiliki nilai rata-rata 3,84 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; dan (d) penganggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, menggambarkan kewajaran beban kerja dan biaya yang dikeluarkan telah mendukung dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, memiliki nilai rata-rata 4,03 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (e) Implementasi anggaran berbasis kinerja memberikan gambaran bahwa pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung pada semua penerimaan dan pengeluaran daerah telah dicatat dan dikelola dalam anggaran, serta jumlah belanja yang dianggarkan merupakan tertinggi untuk setiap pengeluaran, memiliki nilai rata-rata 4,02 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (f) Pelaporan kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung disajikan dalam bentuk laporan keuangan, memiliki nilai rata-rata 3,93 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (g) Evaluasi kinerja anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dilakukan program revisi anggaran sampai mempunyai output yang sesuai jika pelaksanaan program tidak optimal, memiliki nilai rata-rata 3,81 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (h) Umpan balik anggaran berbasis kinerja mengalami peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar

pelayanan minimal sesuai dengan perundang-undangan, memiliki nilai rata-rata 4 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19.

2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan baik, menurut rekapitulasi tanggapan responden memiliki nilai rata-rata 3,85 yang berada pada interval 3,40-4,19 Hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) Efisiensi, setiap aparatur pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin dan setia kegiatan, program, dan kebijakan tersebut dilakukan evaluasi dengan menilai efisiensi biaya sehingga dapat mencegah pemborosan, memiliki nilai rata-rata 3,9 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (b) Efektivitas, program dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap aparatur telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja setiap aparatur telah berjalan efektif, memiliki nilai rata-rata 4,01 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; (c) Pertumbuhan Pegawai, keadaan aparatur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung telah memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, memiliki nilai rata-rata 3,67 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19; dan (d) Kepuasan Pelanggan, kualitas layanan publik terhadap kepuasan masyarakat telah sesuai dengan yang

diharapkan, dimana pemberian jasa layanan dilaksanakan dengan tepat dan cepat sesuai dengan keinginan masyarakat, juga didukung oleh fasilitas memadai, memiliki nilai rata-rata 3,8 termasuk kategori baik yang berada pada interval 3,40-4,19.

3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Besarnya hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) adalah 0,670. Hubungan ini termasuk kategori hubungan yang kuat. Hasil pengujian dengan statistik t didapat nilai t_{hitung} (4,778) > t_{tabel} (2,048). Hal tersebut mengindikasikan penolakan H_0 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Anggaran Berbasis Kinerja (X) dengan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y). Besarnya pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) digunakan koefisien determinasi. Hal ini memberikan pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 44,9%, sedangkan sisanya 55,1% merupakan kontribusi variabel lain selain Anggaran Berbasis Kineja

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Sosial

Anggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan baik, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan semua aparat yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mampu melaksanakan anggaran berbasis kinerja dengan lebih baik lagi seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Gambaran yang akan diperoleh lebih luas lagi mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur bila penelitian dilakukan terhadap beberapa dinas sekaligus atau pemerintah Jawa Barat atau Kota/ Kabupaten lainnya. Karena tingkat pengaruh anggaran berbasis kinerja pada salah satu dinas belum tentu sama dengan tingkat pengaruh anggaran berbasis kinerja pada dinas lainnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas pemilihan variabel lain agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah guna mendorong terwujudnya *good governance*.